



Disperkim
Provinsi Sumatera Selatan

LKJIP 2025



**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**

Jalan Ade Irma Nasution, No. 10 Kec. Ilir Timur I, Palembang

KATA PENGANTAR

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2025 baik kegiatan rutin maupun kegiatan fisik yang dana kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dituangkan ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai turunan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang utuh dan memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk menyiapkan pertanggung jawaban kinerja kepada Gubernur Sumatera Selatan;
2. Laporan Kinerja merupakan bahan untuk saran evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai target dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025. Pencapaian sasaran kinerja, merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selain dimanfaatkan untuk perbaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya untuk pemenuhan visi dan misi yang telah digariskan di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan juga unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pekerjaan Umum Keciaptakaryaan, wajib menyampaikan LKjIP secara teratur, jelas dan tepat waktu. Format penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir Kata, kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 30 Januari 2026

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**



Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197511251999031004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar/Grafik	vii
Daftar Lampiran	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	4
1.4 Susunan dan Struktur Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	5
II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	10
2.3 Pohon Kinerja	12
2.4 Perjanjian Kinerja	12
III. AKUNTABILITAS KERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	18
2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024	20
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	36

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	36
5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi	37
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
 B. Realisasi Anggaran	 47
 IV. PENUTUP.....	 50

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Klasifikasi Berdasarkan Unit Kerja	5
1.2 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)	5
1.3 Klasifikasi Berdasarkan Esselon	6
1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
1.5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan PPPK.....	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Perubahan.....	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Setelah Perubahan.....	13
2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	14
2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	15
3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	16
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	17
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	18
3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	36
3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	37
3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	38
3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	39
3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran ..	40

3.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	40
3.10	Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2025.	41
3.11	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	48
3.12	Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja
- Lampiran 3 : Pohon Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 4 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat pada Pasal 28 H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Negara Indonesia secara umum dan Pemerintah Indonesia secara khusus untuk mengutamakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, prasarana, dan utilitas umum sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat.

Dalam penyelenggaraan program tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemegang hak otonomi daerah di Indonesia berupaya menjalankan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan mempertimbangkan azas yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah azas akuntabilitas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan keciptakaryaan. Sebagai landasan formal dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta merupakan pelaksanaan dari penerapan azas akuntabilitas, maka diupayakan untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Substansi dari sistem AKIP yang harus diupayakan untuk dibangun atau dikembangkan adalah melalui penyusunan dan pelaksanaan perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja yang terukur serta pelaporannya. Sebagai bentuk pelaksanaan azas akuntabilitas tersebut, dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Permenpan No. 53 Tahun 2014.

1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka secara umum isu-isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi gedung dan bangunan sarana milik pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak dan tidak sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Serta Inventarisasi data kondisi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi yang sebagian dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai;
2. Masih rendahnya cakupan layanan air minum regional lintas kabupaten/kota dan penyediaan air minum non perpipaan terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air baku yang layak;
3. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan drainase permukiman masih banyak yang tidak layak, sehingga mengakibatkan genangan air di musim hujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam aktivitas ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan;
4. Jumlah kawasan yang memiliki sanitasi layak masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan yang layak huni sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kawasan kumuh;
5. Penanganan persampahan belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah. Hal ini juga dikarenakan belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Penanganan kawasan kumuh yang masih penuh dengan tantangan dengan minimnya dukungan masyarakat untuk menciptakan kawasan layak huni;
7. Melakukan Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis Nasional;
8. Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama lintas kabupaten/kota;
9. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, pemekaran wilayah, dan penyelesaian konflik lahan;
10. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, penataan kawasan dan lingkungan ruang publik dan kawasan strategis provinsi masih banyak yang belum terlaksana dengan baik sehingga di butuhkan penataan dan pengembangan dan pembangunan kawasan (site development);
11. Melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan provinsi strategis;
12. Mendukung Prioritas Pembangunan Kewilayahan pada dokumen RPJMN sesuai dengan highlight intervensi dan lokasi prioritas yang ditetapkan RPJMN, seperti :
 - Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang
 - Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin
 - Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin
 - Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi Pekerja, MBR, Gen Z dan Milenial di WM Palembang (PHTC)

13. Mengembangkan inovasi daerah dari segi regulasi, teknologi dan ketersediaan aplikasi informasi layanan di bidang keciptakaryaan dan perumahan permukiman berbasis elektronik;
14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga harus berkolaborasi dengan pusat untuk pembangunan rumah layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini merupakan Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat untuk dapat hidup yang layak serta bekerjasama dengan BAZNAS untuk mencari sumber Pendanaan Penyediaan perumahan;
15. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini karena masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 merupakan cara untuk mencapai strategi yang telah ditentukan, dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu kebijakan, dengan total 17 arah kebijakan. Berikut beberapa arah kebijakan yang bersifat strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni;
2. Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabupaten/Kota untuk penerbitan update SK Kumuh Kabupaten/Kota secara berkala;
3. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi jalan lingkungan, drainase, air limbah, air minum, pembuangan sampah;
4. Pendataan dan pengidentifikasian korban bencana;
5. Peningkatan infrastruktur SPAM, perbaikan kualitas air;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air melalui perpipaan maupun non perpipaan;
7. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
8. Pembangunan MCK pada setiap rumah atau per Kepala Keluarga;
9. Pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat;
10. Pembangunan infrastruktur dasar yang layak dan terawat termasuk persampahan, air minum dan air limbah yang berada pada kawasan strategis provinsi;
11. Ketersediaan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
12. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

13. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penjenjangan sertifikasi keahlian;
14. Diterbitkannya juknis yang mengatur tentang program kegiatan sertifikasi pengembang perumahan;
15. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
16. Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel;
17. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi, dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur,
- b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota,
- d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air,
- e. Penyelenggaraan penyediaan dukungan atau bantuan untuk kerja sama antar kabupaten atau kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program,
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi,
- h. Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi,

- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara/daerah,
- j. Pembinaan administrasi, kepegawaian, dan unit pelaksanaan teknis,
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 Susunan dan Struktur Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 berjumlah **225 (dua ratus dua puluh lima)** orang Aparatur Sipil Negara yang diklasifikasikan berdasarkan unit kerja, pangkat (golongan/ruang), eselon, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3, dan Tabel 1.4.

a. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 1.3 Klasifikasi Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1.	Sekretariat	14	14	9	11	48
2.	Bidang Pengembangan Kawasan P	13	15	4	13	45
3.	Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	17	9	8	4	38
4.	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	11	8	6	36
5.	UPTD PIP2B & Jasa Konstruksi	8	5	3	5	21
6.	Bidang Perumahan	9	10	11	7	37
	Jumlah	72	64	43	46	225

b. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

Tabel 1.1 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

No.	Golongan	Laki-Laki				Perempuan				Jumlah
		A	B	C	D	A	B	C	D	
1.	Golongan IV	8	4	3	0	7	0	0	0	22
2.	Golongan III	6	10	8	20	4	14	3	8	73
3.	Golongan II	0	0	2	1	0	0	0	1	4
4.	Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PPPK	74				52				126
	Jumlah	136				89				225

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Esselon

Tabel 1.2 Klasifikasi Berdasarkan Esselon

No.	Esselonering	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1	0	1
2.	Esselon III	3	1	4
3.	Esselon IV	13	5	18
	Jumlah	17	6	23

d. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1.	S3	1	0	0	0	1
2.	S2	18	0	9	0	27
3.	S1	35	49	24	33	141
4.	Profesi Insinyur	1	0	1	0	2
5.	D4	0	1	1	2	4
6.	D3	3	6	1	7	17
7.	SMA	4	17	1	10	32
8.	SD	0	1	0	0	1
	Jumlah	62	74	37	52	225

e. Jumlah P3K Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan PPPK

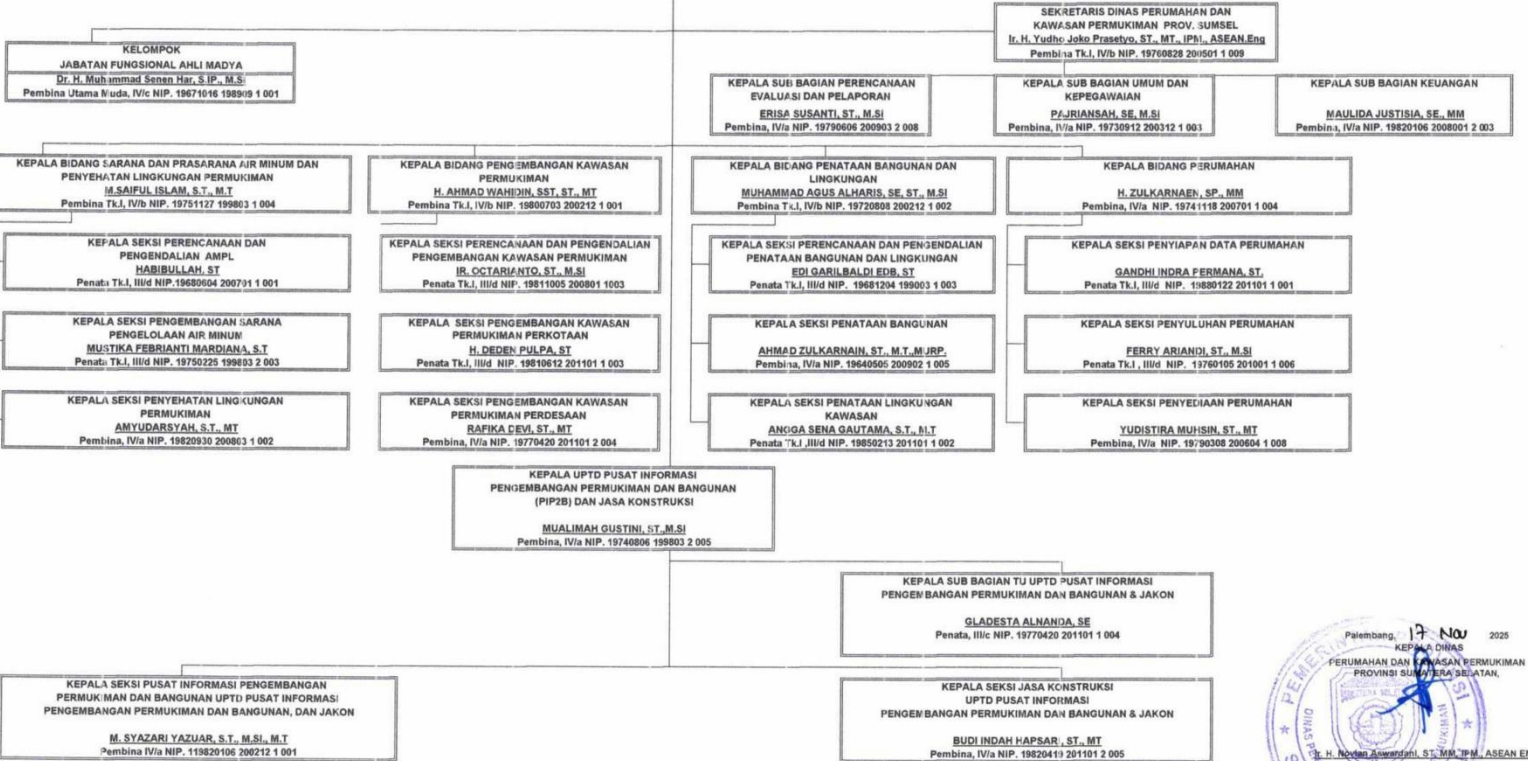
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	0
3.	S1	82
4.	D4	3
5.	D3	13
6.	D1	0
7.	SLTA Sederajat	22
8.	SLTP Sederajat	0
9.	SD	1
10.	SMK	5
	Total	126

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat di bawah ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. SUMSEL
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
IR. H. Novian Aswardani, ST., MM, IPM, ASEAN ENG
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19751125 199903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 66 TAHUN 2016
TANGGAL : 04 JULI 2024



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Periode 2018 - 2023 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada periode tersebut serta untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, pasangan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk masa jabatan 2025 - 2030 yang memiliki Visi sebagai berikut :

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

Pemahaman terhadap visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ***Sumsel*** memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke- 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.
- ***Maju*** bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- **Terus** bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.
- **Semua** mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 7 misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2025-2029, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu penjabaran dari Misi 4 Gubernur Sumatera Selatan, dengan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, yaitu meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum;
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi;
3. Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan Gedung dan Rumah;
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100,00
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,01	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya yaitu Rencana Strategis periode 2019-2023 serta periode 2024-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dapat bermuara pada capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum	1.1.1	Akses Air Minum Layak	%	89,35
				1.1.2	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	1,60
				1.1.3	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	78,98
		1.2.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik				
		1.2	Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi	1.2.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54
				1.2.3	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	8,00
				1.2.4	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	16,67
				1.3.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	83,97
		1.3	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah	1.3.2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	83,09
				1.3.3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	%	12,40
				1.3.4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	49,54
				1.3.5	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	21,86
				1.3.6	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	41,43
				1.3.7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	31,00
1.3.8	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	67,00				
1.4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.4.1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100		

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak tertanggulangi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya.

2.3 Pohon Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada pohon kinerja yang menjelaskan tentang kerangka acuan kerja. Pohon kinerja tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4 Perjanjian Kinerja

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan target kinerja berupa kesepakatan dalam pencapaian target tahun 2025. Target kinerja tersebut digunakan sebagai ruang lingkup tugas pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan instansi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yang disertai dengan indikator kinerja. Target kinerja tahun 2025 itu dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Indikator Kinerja dan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Perubahan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	11,43%
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	36,10%
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	83%
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	89,35%
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	81,62%
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	%	33%

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Setelah Perubahan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	%	89,35
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	65,01
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	34,00

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	83,97%
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83,09%
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	12,4%
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	49,54%
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	21,86%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Air Minum Layak	89,35%
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1,6%
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1,10%
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	8%
9	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	78,98%
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	41,43%
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	31%
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	67%

Tabel 2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	83,97%
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83,09%
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	12,4%
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	49,54%
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	21,86%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Air Minum Layak	89,35%
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1,6%
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1,10%
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	8%
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	16,67%
10	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	78,98%
11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	41,43%
12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	31%
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	67%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan indikator untuk menentukan tercapainya atau tidaknya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Suatu perangkat daerah dapat dikatakan berhasil pada suatu program atau kegiatan apabila nilai capaian kerjanya memenuhi target yang telah ditentukan.

Indikator kinerja yang dianalisis diuraikan menjadi 4 (empat) Indikator kinerja yang memiliki target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Indikator Kinerja yang dimaksud yaitu Akses Air Minum Layak, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan, dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35%	86,82%	97,17%	Sangat Tinggi	Bidang Penyediaan Sarpras AMPLP
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%	85,5%	106,16%	Sangat Tinggi	Bidang Penyediaan Sarpras AMPLP
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,01%	65,74%	101,12%	Sangat Tinggi	Bidang PKP
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaian	34,00%	60,93%	179,21%	Sangat Tinggi	Bidang Penyediaan Sarpras AMPLP

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Target dan Realisasi serta capaian per indikator kinerja tahun 2025. Sebagian besar Indikator Kinerja memiliki Capaian Kinerja yang sudah mencapai bahkan melebihi nilai 100%. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 106,15%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan;
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan capaian kinerja sebesar 101,12%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah banyak hunian/rumah yang telah memenuhi 4 kriteria sebagai hunian/rumah layak huni yaitu :
 1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita;
 2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
 3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
 4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmer / granit / keramik / parket / vinil / karpet / ubin / tegel/ teraso / kayu / papan/ semen / bata merah.Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaian dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja sebesar 179,21% . Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang luas dan terpelihara,

teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%. Indikator kinerja tersebut yaitu :

1. Akses Air Minum Layak sebesar 97,17% belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2025 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut.

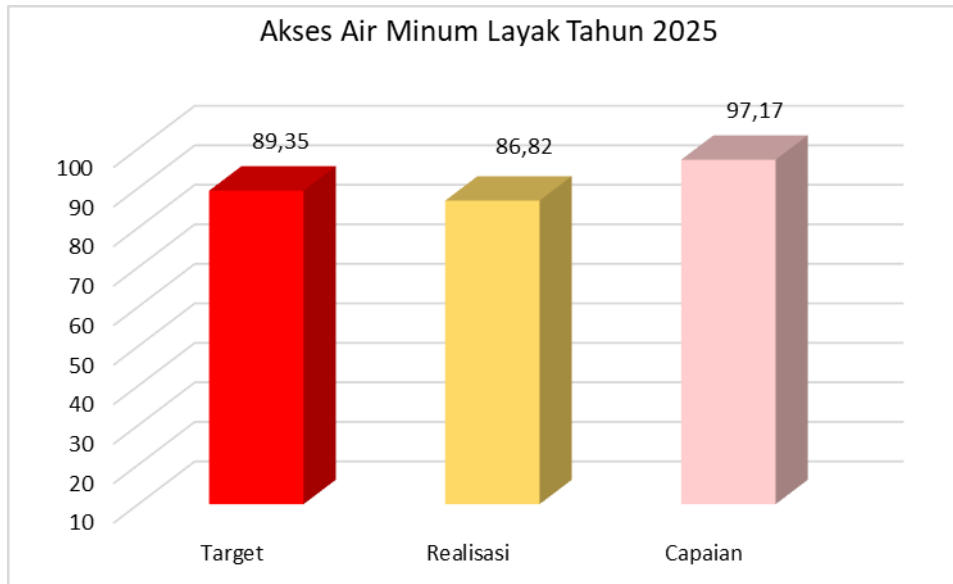
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indikator Lama									
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,21%	11,40%	101,69%	-	-	-	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02%	49,37%	145,12%	-	-	-	Indikator sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2020 dan UU. No 23 tahun 2014
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%	100%	121,95%	-	-	-	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	88,35%	87,23%	98,73%	-	-	-	Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut.
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,62%	77,34%	95,93%	-	-	-	Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut.
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	30,0%	96,77%	-	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		Indikator Baru							
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	88,35%	87,23%	98,73%	89,35%	86,82%	97,17%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,62%	77,34%	95,93%	80,54%	85,5%	106,16%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	-	-	65,01%	65,74%	101,12%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	-	-	-	34,00%	60,93%	179,21%	Perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut

2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

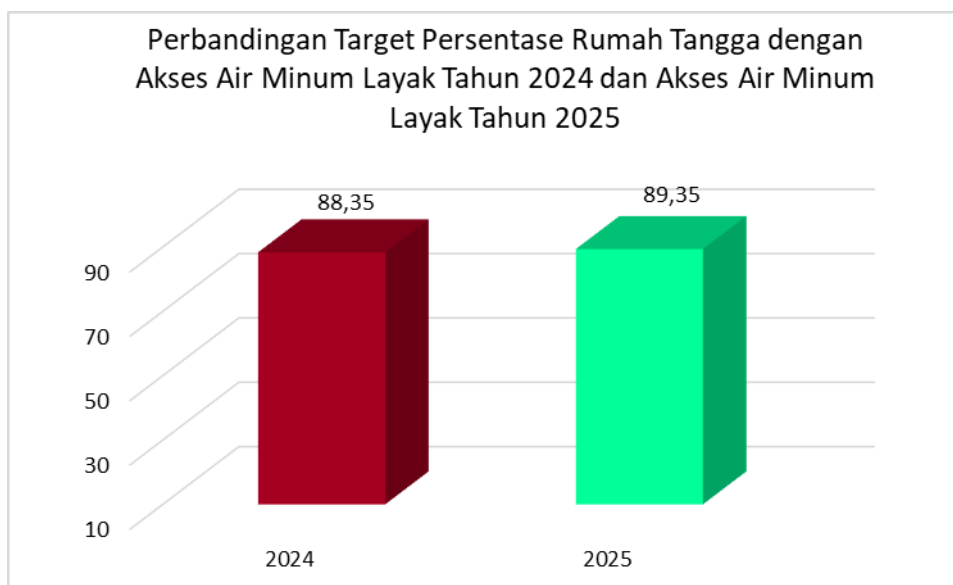
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.1 Kinerja Akses Air Minum Layak Tahun 2025

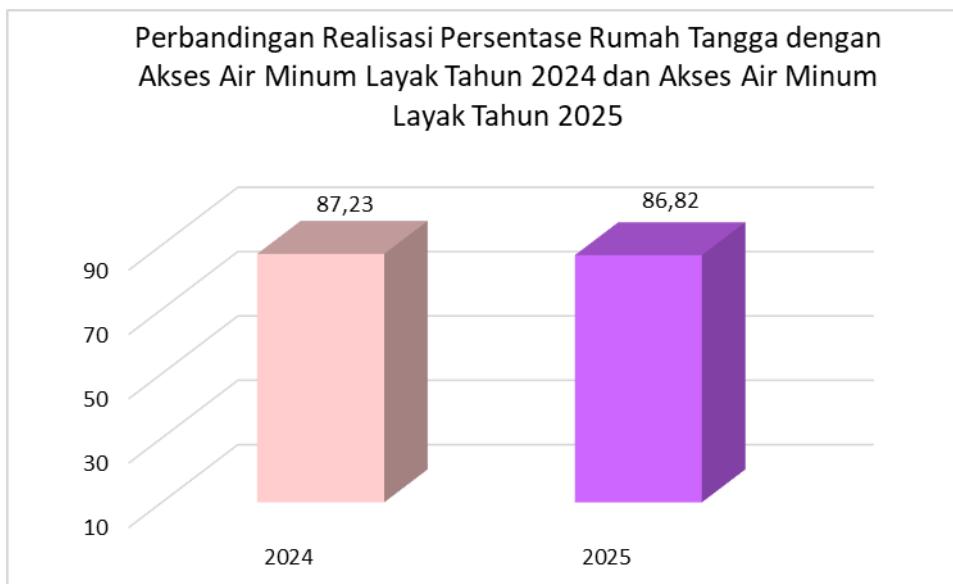
Berdasarkan Grafik 3.1, target Akses Air Minum Layak tahun 2025 adalah 89,35% dengan realisasi sebesar 86,82% sehingga capaian kinerja sebesar 97,17%.

Untuk tahun 2024 dan tahun 2025 perbandingan target kinerja Akses Air Minum Layak dapat dilihat pada Grafik 3.2.



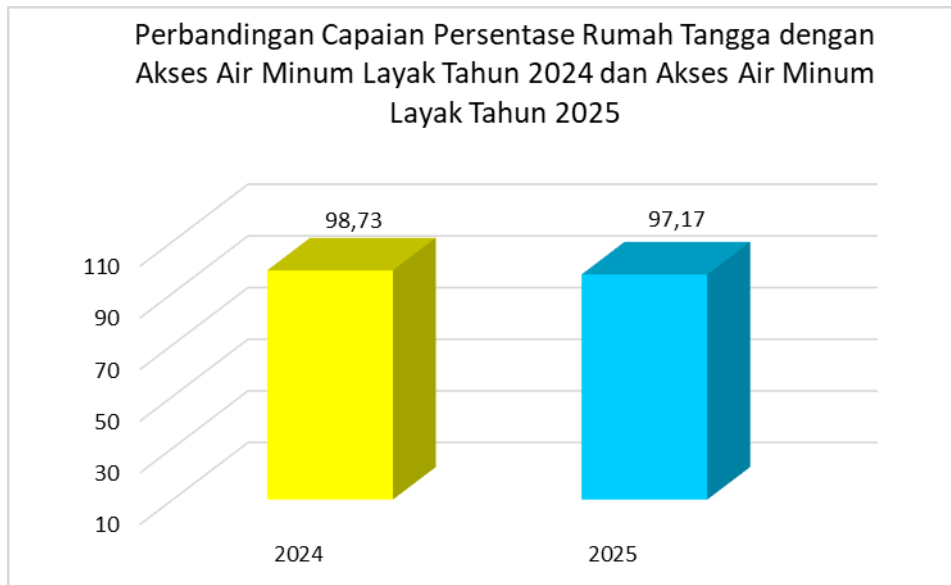
Grafik 3.2 Perbandingan Target Akses Air Minum Layak Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.2, target Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah 88,35% dan target tahun 2025 adalah 89,35%. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Akses Air Minum Layak sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024 dan Akses Air Minum Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.3, realisasi Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah 87,23%, kemudian pada tahun 2025 realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 86,82% dikarenakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Akses Air Minum Layak. Dalam hal ini realisasi pada tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun 2024 karena bidang terkait tidak melakukan survei terhadap air minum layak. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan hanya mendata terkait infrastruktur. Data realisasi didapat dari Badan Pusat Statistik, yang mengukur indikator air minum layak adalah Dinas Kesehatan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan terkait mekanisme perhitungan indikator Air Minum Layak. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.4.



Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024 dan Akses Air Minum Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.4, capaian Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah 98,73%, kemudian pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu 97,17%. Penurunan capaian dikarenakan penurunan realisasi pada target di tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 dapat dijabarkan pada uraian sebagai berikut:

- Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang
- Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Lahat
- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel. Jua-Jua
- Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Distribusi dia. 160 mm dan dia. 90 mm Jl. Rimbe Tenan Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim

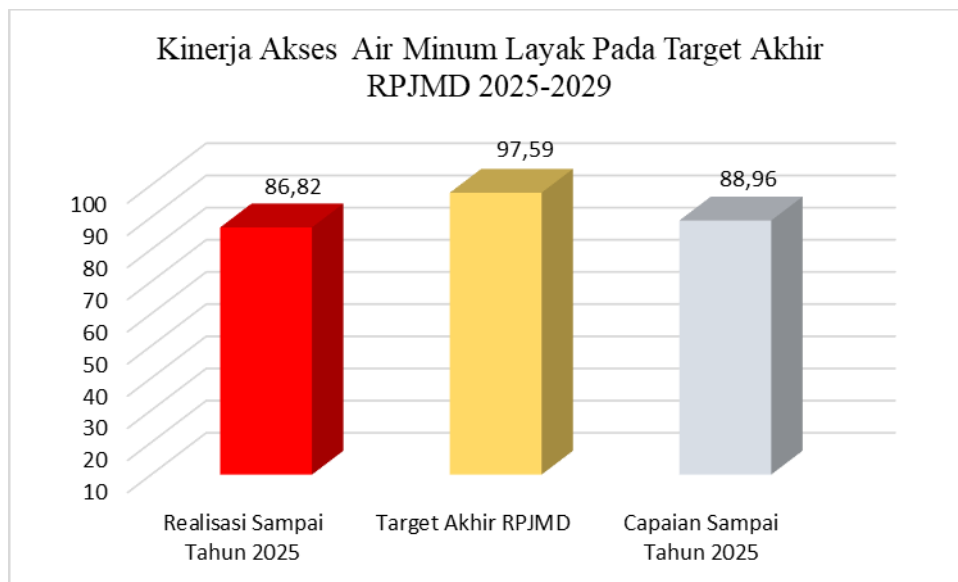
Gambar 3.1 merupakan beberapa gambar yang diambil dalam kegiatan Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan penunjang Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2025.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Kel. Jua-Jua Kab. OKI

Gambar diatas menunjukkan progres Kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi Kel.Jua-Jua

Adapun target Akses Air Minum Layak pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebesar 97,59%. Sampai tahun 2025 sudah 59 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik kegiatan masing-masing sebesar 100% sehingga cakupan akses air minum mencapai 86,82%. Artinya, persentase capaian pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sejauh ini adalah sebesar 88,96%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

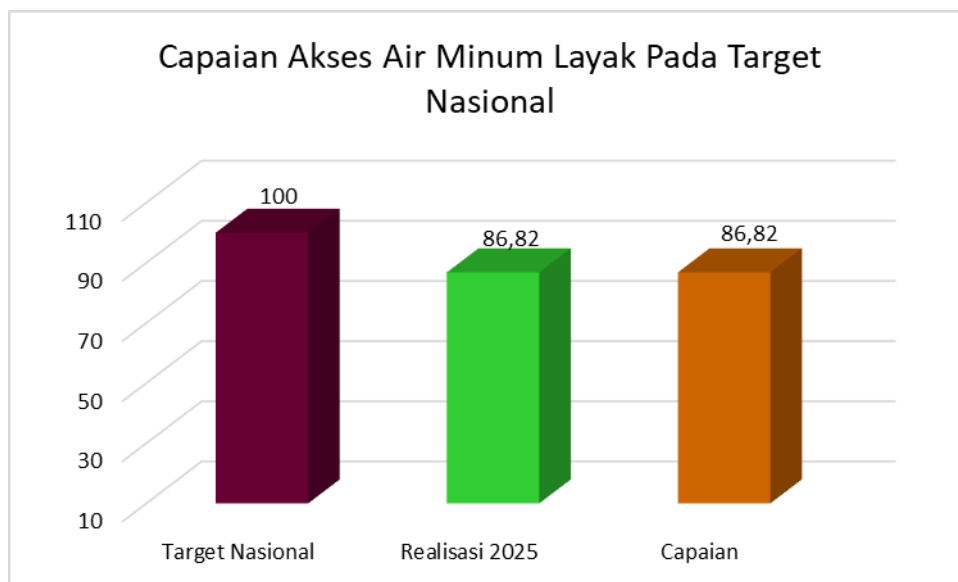


Grafik 3.5 Kondisi Kinerja Akses Air Minum Layak RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Untuk mencapai target kinerja di akhir periode RPJMD 2025-2029, perlu adanya analisis pemetaan kebutuhan air minum yang terbaru agar kegiatan penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.

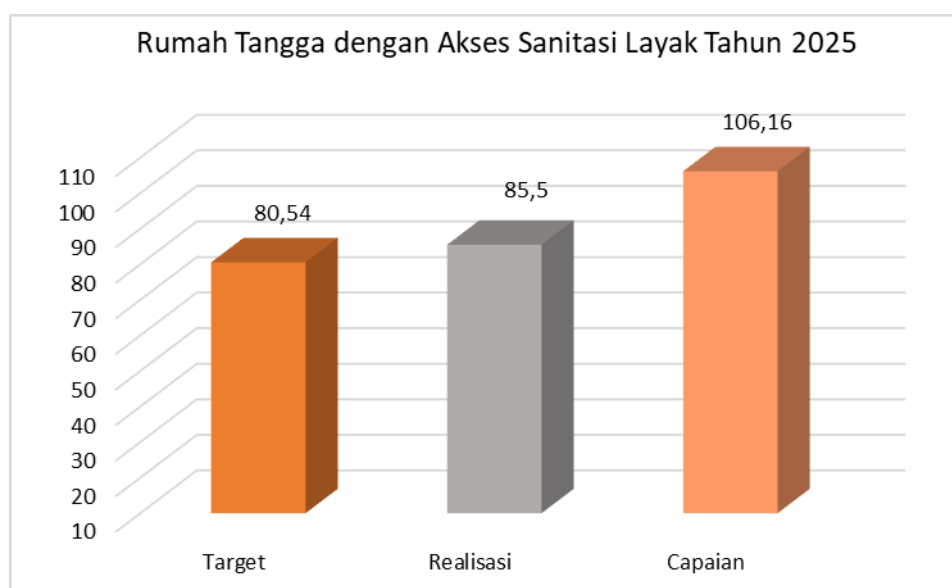
Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2025-2045 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini

melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (Sumber: RPJMN 2025-2045). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung tercapainya target tersebut sampai tahun 2025 adalah sebesar 86,82% dengan rincian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut grafik Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada RPJMN 2025



Grafik 3.6 Capaian Akses Air Minum Layak Pada Target Nasional

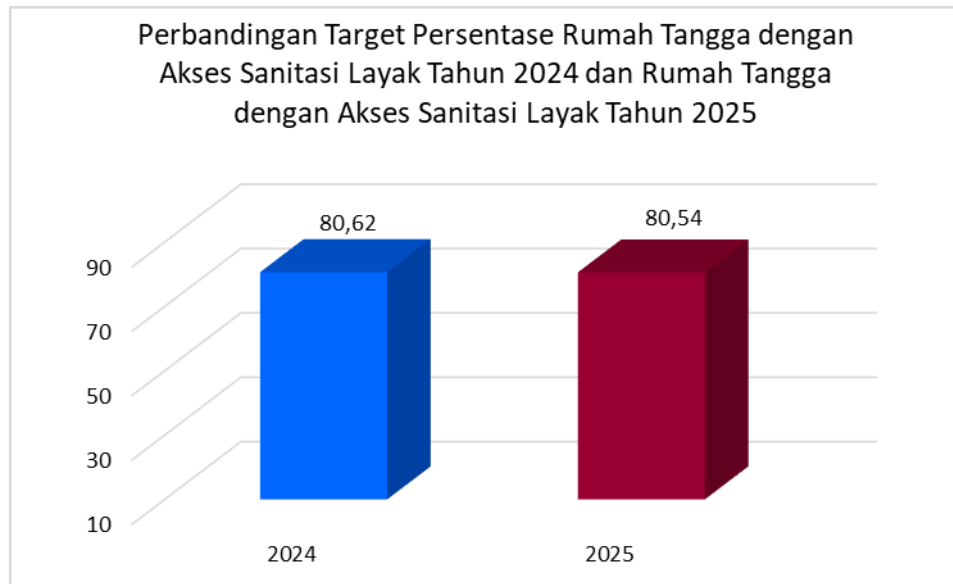
Pada indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak target, realisasi dan capaian tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025

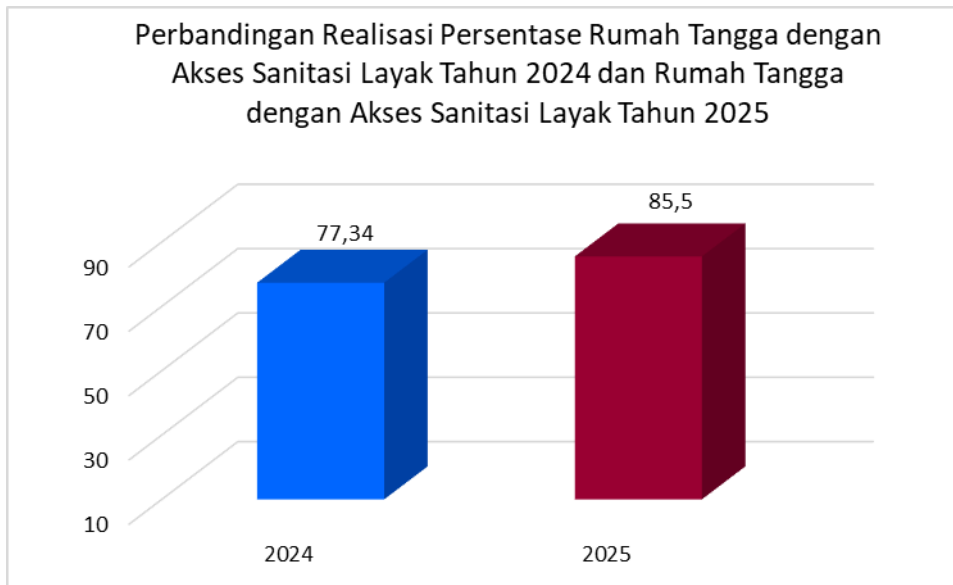
Berdasarkan grafik di atas dengan target 80,54%, maka realisasinya adalah 85,5% dengan capaian sebesar 106,16%.

Selanjutnya, untuk perbandingan target Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2024 dan Akses Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik 3.8 dibawah.



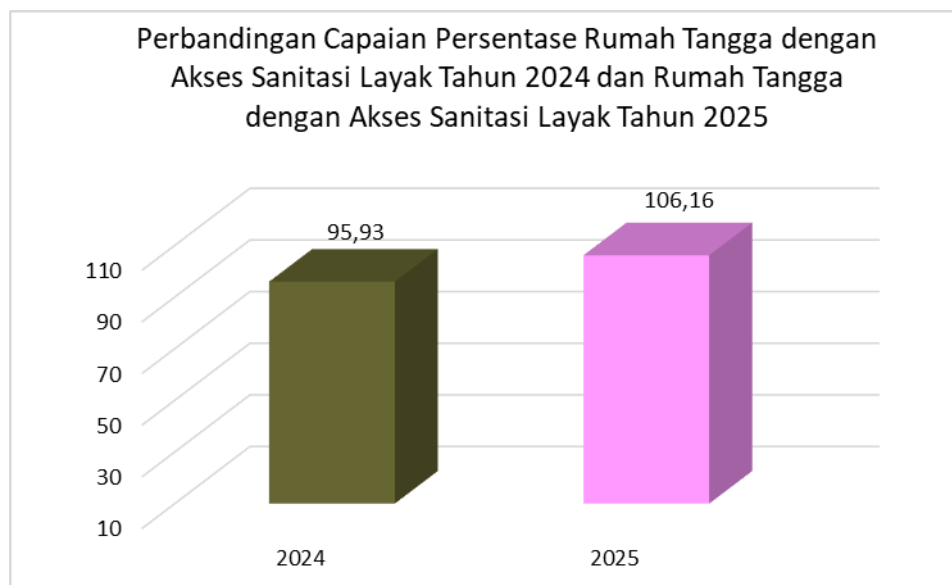
Grafik 3.8 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.7 target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2024 adalah 80,62% dan target Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2025 adalah 80,54%. Penurunan target disebabkan perubahan indikator yang semula Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak diganti menjadi indikator baru yaitu Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020 Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.9



Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

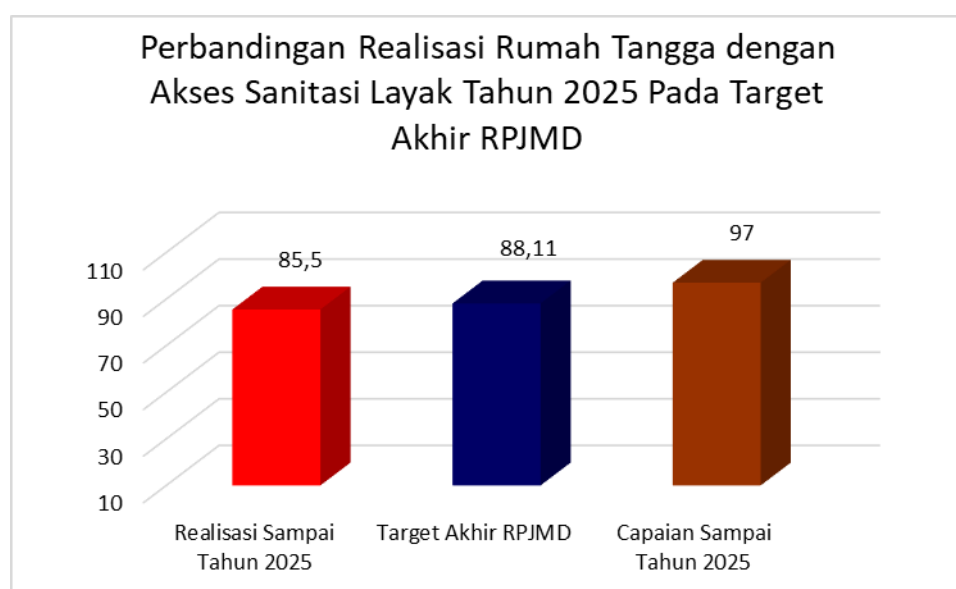
Berdasarkan Grafik 3.8 realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2024 adalah 77,34%, kemudian pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 85,5%. Hal ini merepresentasikan bahwa cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan dan tiap rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan secara pribadi atau bersama dengan rumah tangga tertentu (terbatas). Perhitungan capaian menggunakan data dari Badan Pusat Statistik sebagai penanggung jawab dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai pendukung dari indikator tersebut. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.10



Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024 dan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.9 capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2024 adalah 95,93%, kemudian pada tahun 2025 terdapat kenaikan capaian yaitu 106,16%.

Adapun target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebesar 88,11%. Sampai tahun 2025 sudah 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sehingga realisasi rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 85,5%. Artinya, persentase capaian pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sejauh ini adalah sebesar 95%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

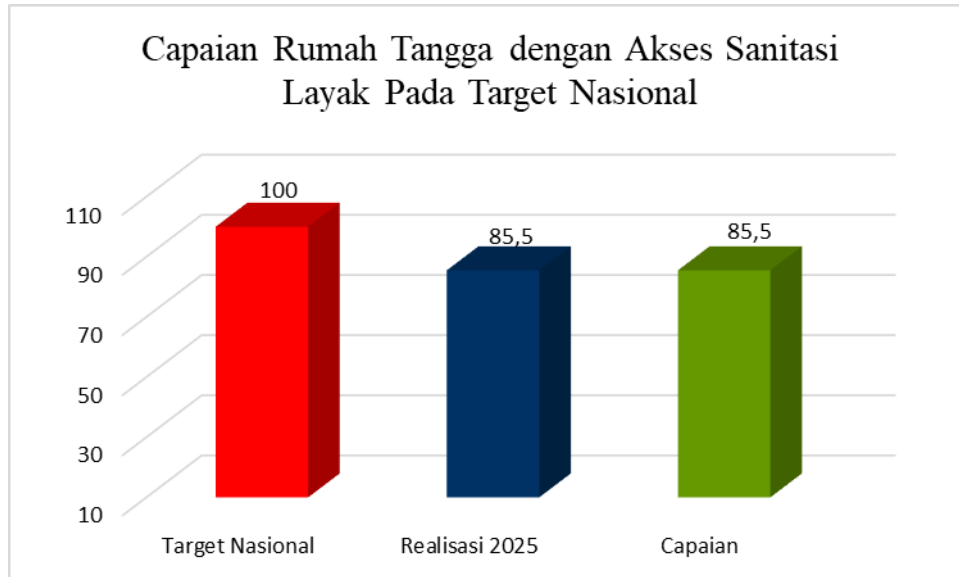


Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025 Pada Target Akhir RPJMD

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Untuk mencapai target akhir periode RPJMD 2025-2029, perlu ditingkatkan kegiatan penyelenggaraan akses sanitasi layak baik secara kuantitas dan kualitas kedepannya.

Target nasional Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak adalah sebesar 100%. Proyek prioritas strategis yang diselenggarakan pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut adalah Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (100% Rumah Tangga). Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat (Sumber: RPJMN 2025-2045).

Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung proyek prioritas strategis tersebut yaitu sebesar 85,5% sampai tahun 2025 dengan rincian kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Grafik target nasional Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dapat dilihat sebagai berikut.



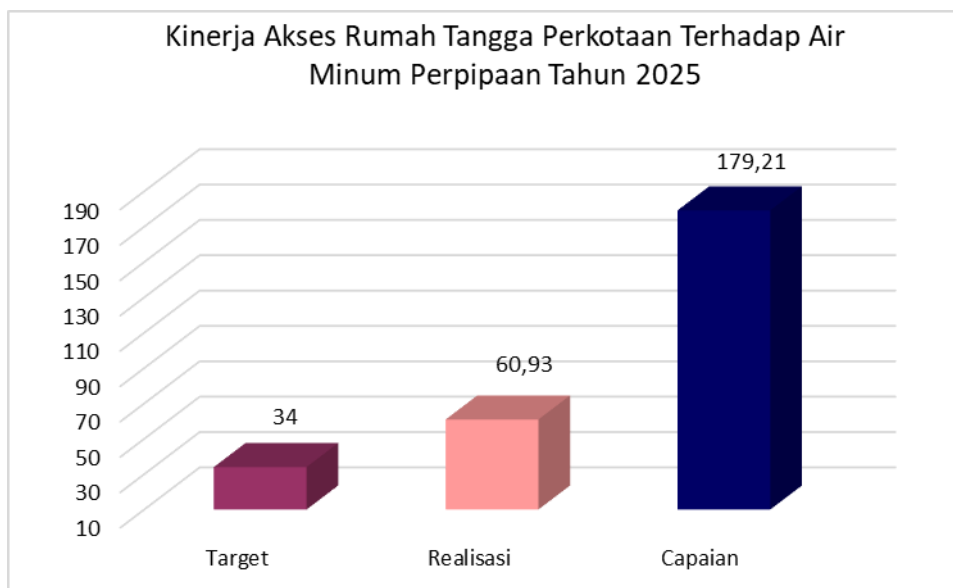
Grafik 3.12 Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Pada Target Nasional

Berikut ini merupakan beberapa gambar yang diambil pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Muara Dua Kab. Oku Selatan sebagai kegiatan yang menunjang peningkatan Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di tahun 2024.



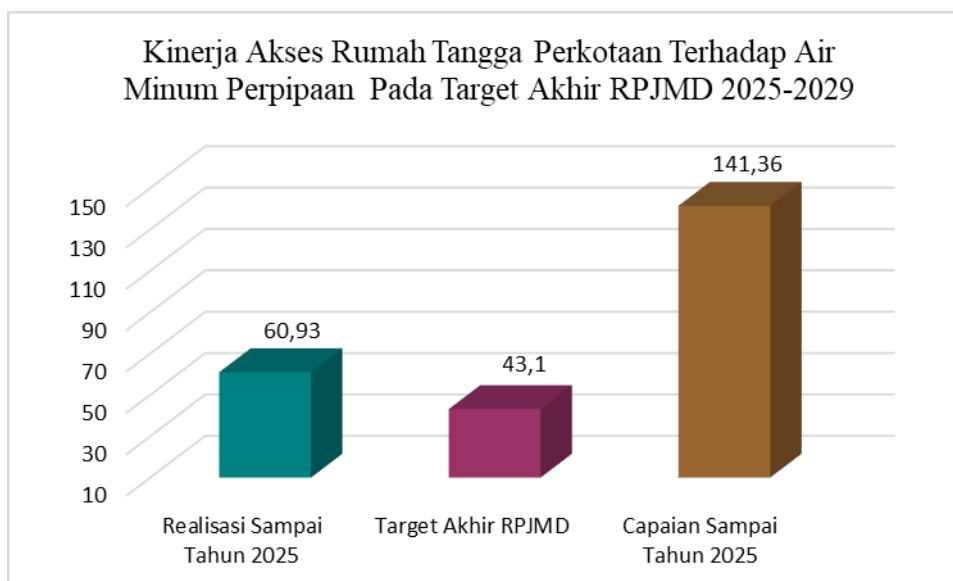
Gambar 3.2 Dokumentasi kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi Sekayu dan Sekitarnya

Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.13 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Tahun 2025

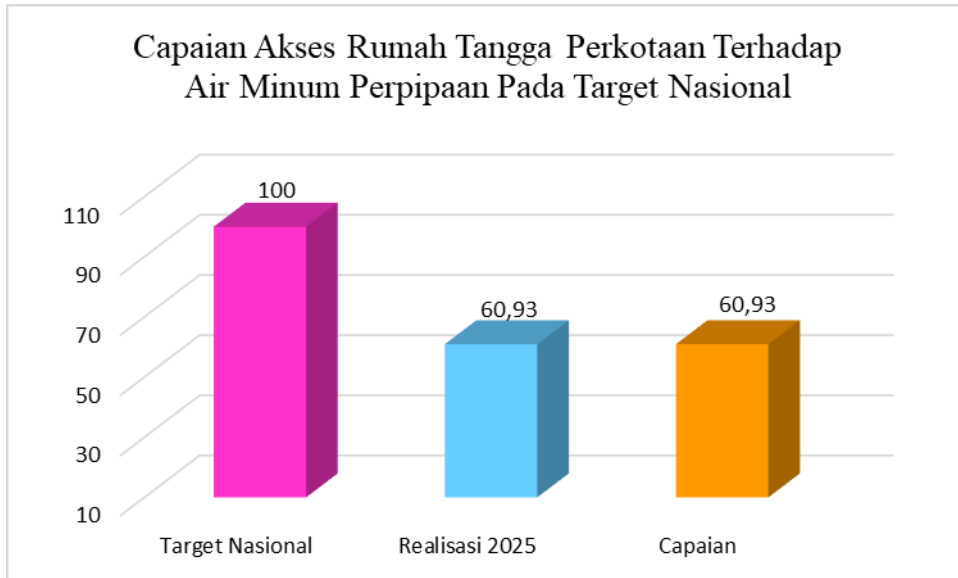
Berdasarkan grafik tersebut, target Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 sebesar 34% dan realisasi sebesar 60,93% serta capaian sebesar 79,21%. Adapun target indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Untuk kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan pada akhir periode RPJMD dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.14 Kinerja Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan Tahun 2025 Pada Target Akhir RPJMD 2025-2029

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2025 sebesar 60,93% dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 43,1% telah mencapai target akhir RPJMD dengan adanya program/kegiatan yang menunjang indikator tersebut. Sehingga didapat capaian sampai tahun 2025 sebesar 141,36%.

Target nasional Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan adalah 100% dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 60,93% sehingga capaian pada standar nasional sebesar 60,93%. Grafik Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan pada standar nasional dapat dilihat sebagai berikut :



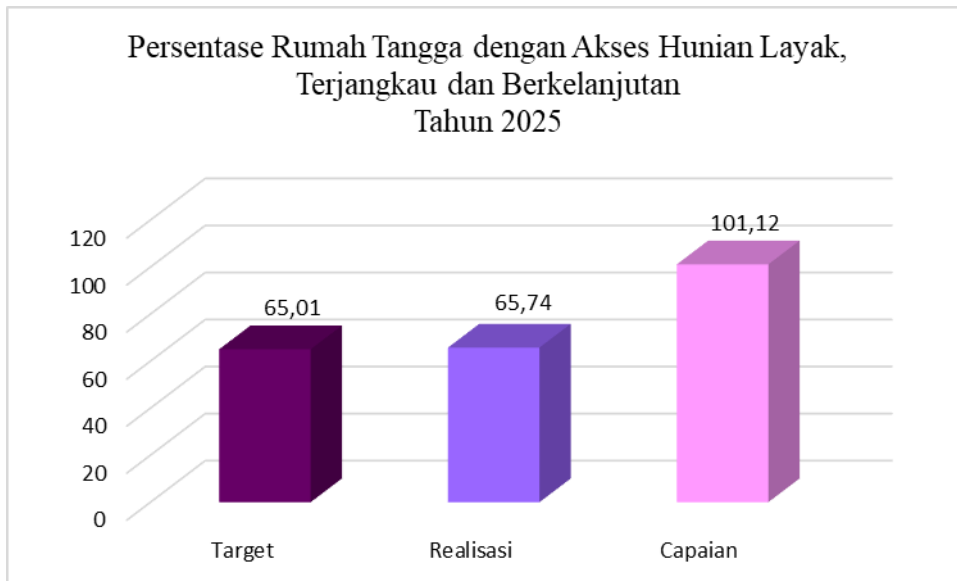
Grafik 3.15 Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan Pada Target Nasional

Dokumentasi kegiatan indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Minum Perpipaan dapat dilihat sebagai berikut



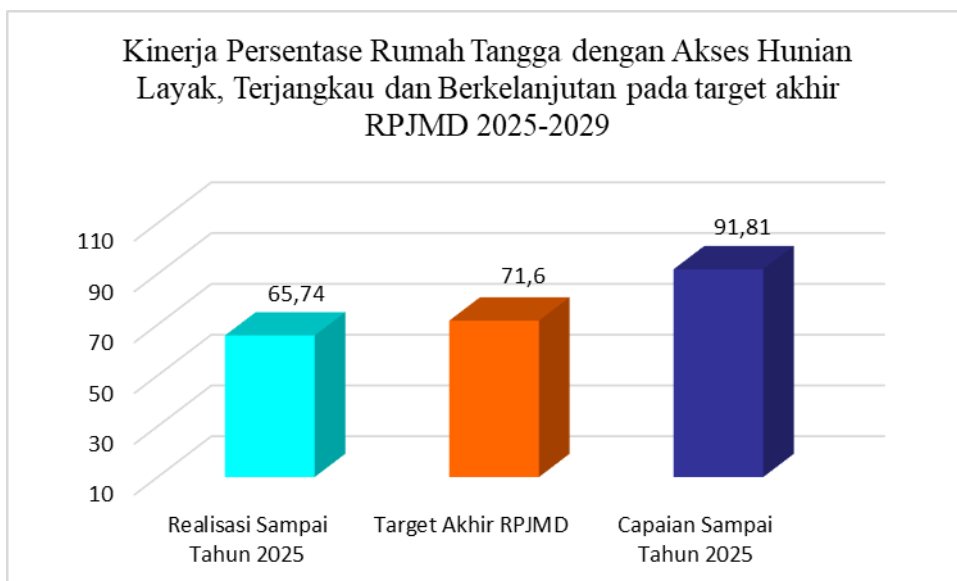
Gambar 3.3 Dokumentasi kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Lahat

Kinerja indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.16 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2025

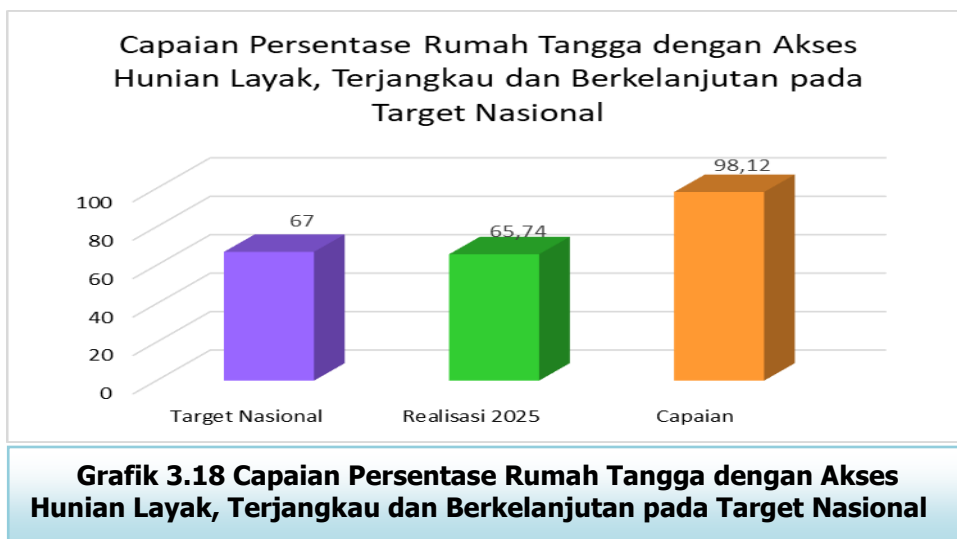
Berdasarkan grafik di atas, Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tahun 2025 sebesar 65,01% dengan realisasi sebesar 65,74 dan capaian sebesar 101,12%. Adapun target indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025. Untuk kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan pada target akhir RPJMD 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.17 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Pada Akhir RPJMD 2025-2029

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2025 sebesar 65,74% dengan target akhir RPJMD 2029 sebesar 71,6% dan capaian sampai tahun 2025 sebesar 91,81%.

Target nasional Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan adalah 67% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 65,74% sehingga capaian yang didapat adalah 98,12%. Grafik capaian kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut:

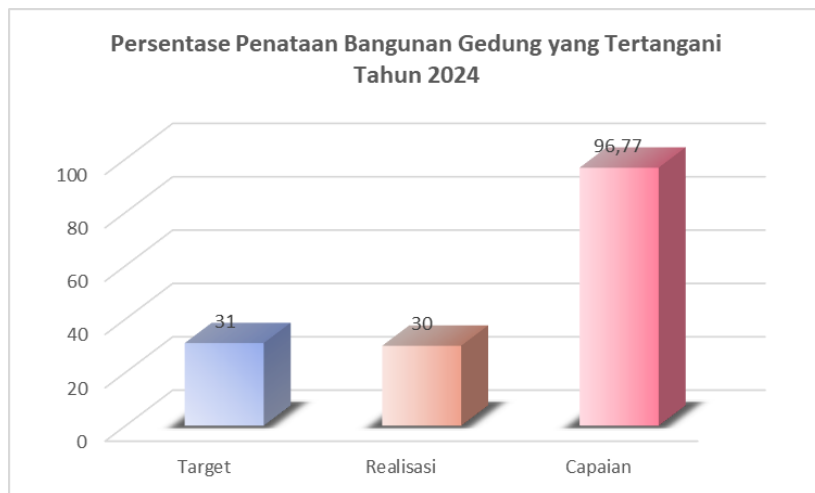


Berikut dokumentasi kegiatan Gerak Cepat Rumah Tidak Layak Huni melalui CSR oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Gerak Cepat Rumah Tidak Layak Huni melalui CSR oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk Indikator Kinerja Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani, pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator tersebut berubah menjadi IKK dengan Indikator yang berbeda. Adapun capaian Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.19 Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2024

Adapun target untuk indikator Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani pada tahun 2024 adalah 31%.

Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



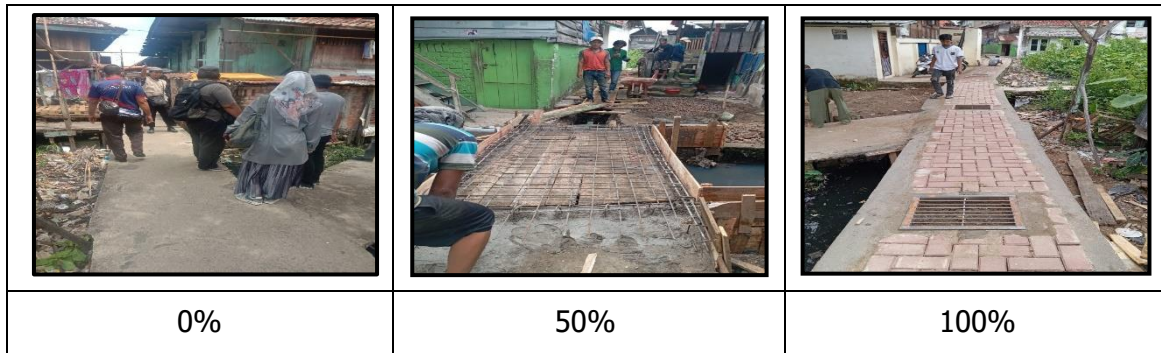
Grafik 3.20 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani sebesar 11,40%. Adapun target untuk indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani pada tahun 2024 adalah 11,21%. Sehingga capaian adalah 101,69%. Pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Melainkan menjadi Indikator Kinerja Kunci. Sehingga tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam LKjIP.

Adapun kegiatan yang mendukung indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha. Keberhasilan ini juga karena kegiatan berjalan sesuai dengan titik lokasi yang tercantum di SK Kumuh Kabupaten/Kota dan telah dilakukannya kerjasama CSR terkait pemenuhan kualitas Rumah Tidak Layak

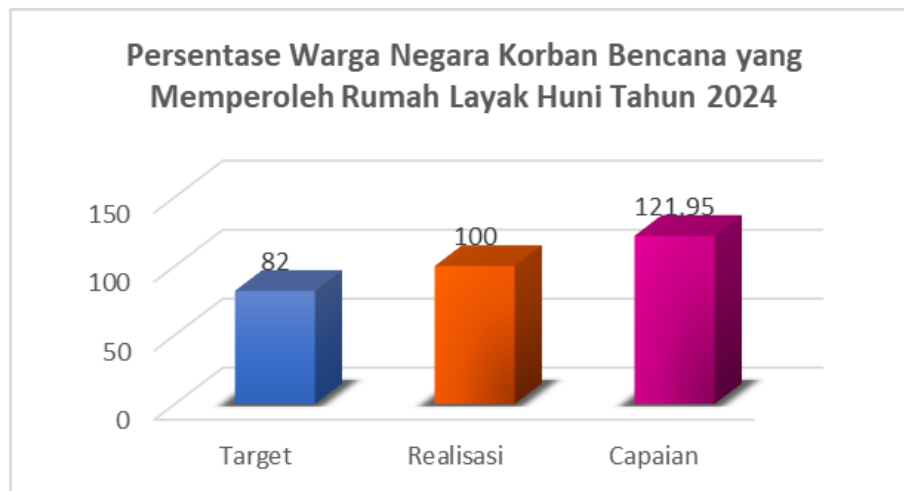
Huni (RTLH).

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah adalah dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Jalan Lingkungan dan Drainase Permukiman Kumuh Kel. 29 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang :



Gambar 3.5 Foto Kegiatan indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani

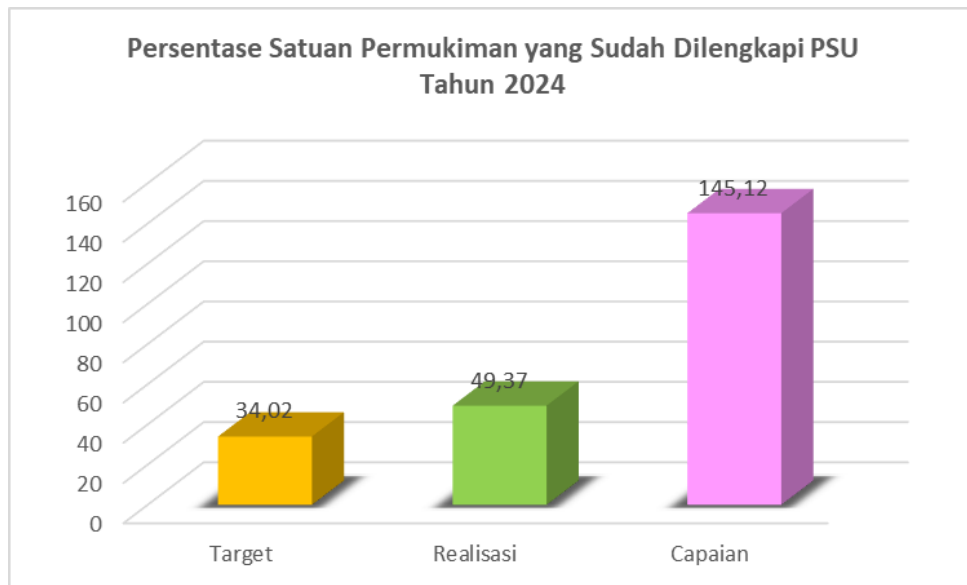
Selanjutnya kinerja Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.21 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, target untuk indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2024 adalah 82%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sebesar 121,95%. Pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Melainkan menjadi Indikator Kinerja Kunci. Sehingga tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam LKjIP.

Selanjutnya untuk indikator Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.22 Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa target Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024 sebesar 34,02% dengan realisasi sebesar 49,37% serta capaian sebesar 145,12%. Pada tahun 2025, indikator tersebut tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama. Melainkan menjadi Indikator Kinerja Kunci. Sehingga tahun 2025 indikator tersebut tidak lagi dimasukkan dalam LKjIP

Dokumentasi kegiatan untuk indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah adalah dokumentasi kegiatan Penyediaan PSU Permukiman Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir :



Gambar 3.6 Foto Kegiatan indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2030

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 1 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.4 yang merupakan kemajuan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	97,17%	100%	97,17
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	106,16%	90%	117,96
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	101,12%	72,6%	139,28
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	179,21%	43,20%	414,84

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional. Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dari Pemerintah Pusat terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Penyandingan realisasi kinerja tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	86,82%	100%	86,82%
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85,5%	100%	85,50%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,74%	67%	98,12%
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	60,93%	100%	60,93%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pada tahun 2024 dibagi menjadi empat indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja indikator 100% atau keatas. Empat indikator kinerja tersebut adalah Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani, Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak.

Adapun analisis penyebab kegagalan kinerja pada tahun 2024 dibagi menjadi dua indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja dibawah 100%. Dua indikator kinerja tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani.

Penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi pada indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini

Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35%	86,82%	97,17%	Realisasi pada indikator belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2025 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Prov SumSel menunjukkan bahwa beberapa kabupaten masih memiliki capaian rendah dalam pengawasan sarana air minum, yang menyebabkan kualitas air yang sampai ke rumah tangga tidak selalu masuk kategori layak meski sumbernya ada.	Perlu ada pembahasan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan.
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%	85,5%	106,16%	Realisasi pada indikator telah mencapai target karena data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan kenaikan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk telah memenuhi target yang telah ditentukan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan pembangunan dan menyelenggarakan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Program ini berfungsi sebagai peta jalan untuk memastikan pembangunan infrastruktur sanitasi di setiap kabupaten/kota terukur dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,01%	65,74%	101,12%	Realisasi pada indikator telah mencapai target karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah banyak hunian/rumah yang telah memenuhi 4 kriteria sebagai hunian/rumah layak huni yaitu: 1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m/kapita; 2. Memiliki akses terhadap air minum layak; 3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak; 4. Ketahanan bangunan yaitu atap terluas berupa beton/ganteng/seng/kayu/sirap, dinding terluas berupa marmar/granit/keramik/parket/vinil/karpet/tubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah. Terdapat juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dikenal sebagai program bedah rumah, yang fokus memperbaiki RTLH agar memenuhi kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi serta terdapat program 3 juta rumah untuk mempercepat penyediaan hunian bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan tetap melaksanakan program bedah rumah untuk meningkatkan kualitas RTLH, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan melakukan penyediaan infrastruktur dasar serta melaksanakan kerjasama dengan CSR.
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	34,00%	60,93%	179,21%	Realisasi pada indikator telah mencapai target karena adanya kerjasama dengan PDAM dalam penyediaan jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Serta kecukupan sumber air baku, jaringan perpipaan yang luas dan terpelihara, teknologi pengolahan yang sesuai, dan tingkat kebocoran air yang rendah.	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PDAM dalam tata kelola layanan air, memperluas jaringan perpipaan ke kawasan perkotaan yang belum terlayani serta menurunkan tingkat kebocoran air untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain keberhasilan dan kegagalan pada indikator, terdapat juga analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	86,82%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	97,17%	Menunjang
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85,5%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	106,16%	Menunjang
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,74%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	101,12%	Menunjang
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	60,93%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	179,21%	Menunjang

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025 adalah sebanyak 12 Program dan 25 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18 lembaga, Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 17 kabupaten/kota

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 17 kabupaten/kota.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi sebanyak 2 dokumen; Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun sebanyak 1 sistem drainase.

4) Program Penataan Bangunan Gedung

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat sebanyak 10 peserta; Jumlah Rumah Negara yang Dikelola sebanyak 10 rumah negara; Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang sebanyak 10 lisensi; Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebanyak 17 kabupaten/kota.

5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis

Lainnya yang Ditata sebanyak 1 kawasan, Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 17 kabupaten/kota.

6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih sebanyak 140 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 44 lembaga; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi sebanyak 100 orang; Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya sebanyak 20 orang; Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya sebanyak 2 lembaga; Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan sebanyak 1 layanan informasi, Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan sebanyak 1 perangkat pendukung; Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 17 orang; Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha sebanyak 2 badan usaha; Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun sebanyak 2 dokumen.

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen; Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 2 laporan; Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan; Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan sebanyak 115 orang; Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang

dilaksanakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 6 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan sebanyak 30 orang, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen, Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sebanyak 2 unit sarpras Gedung, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 22 unit roda empat dan 3 unit roda 2, Jumlah Mebel yang Dipelihara sebanyak 1 unit, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit, Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

8) Program Pengembangan Perumahan

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah sebanyak 1 dokumen, Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebanyak 15 orang, Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih sebanyak 2 orang, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan sebanyak 34 orang.

9) Program Kawasan Permukiman

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi sebanyak 6 dokumen, Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara sebanyak 1 sistem informasi, Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina sebanyak 7 kelompok, Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah sebanyak 10 rumah tangga, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebanyak 1 laporan, Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sebanyak 100 orang, Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah sebanyak 10 rumah tangga, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 dokumen, Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan seluas 1 Ha, Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar seluas 1628,58 Ha

10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman sebanyak 1 dokumen, Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 20 lokasi,

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sebanyak 1 laporan.

11) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah sebanyak 1 laporan.

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menindak lanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan bekal keikhlasan, tekad dan kerja keras serta rasa kebersamaan dari berbagai pihak yang terkait akan mampu memenuhi pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik lagi dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang keciptakarya.

Akhirnya dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

dimasa mendatang.

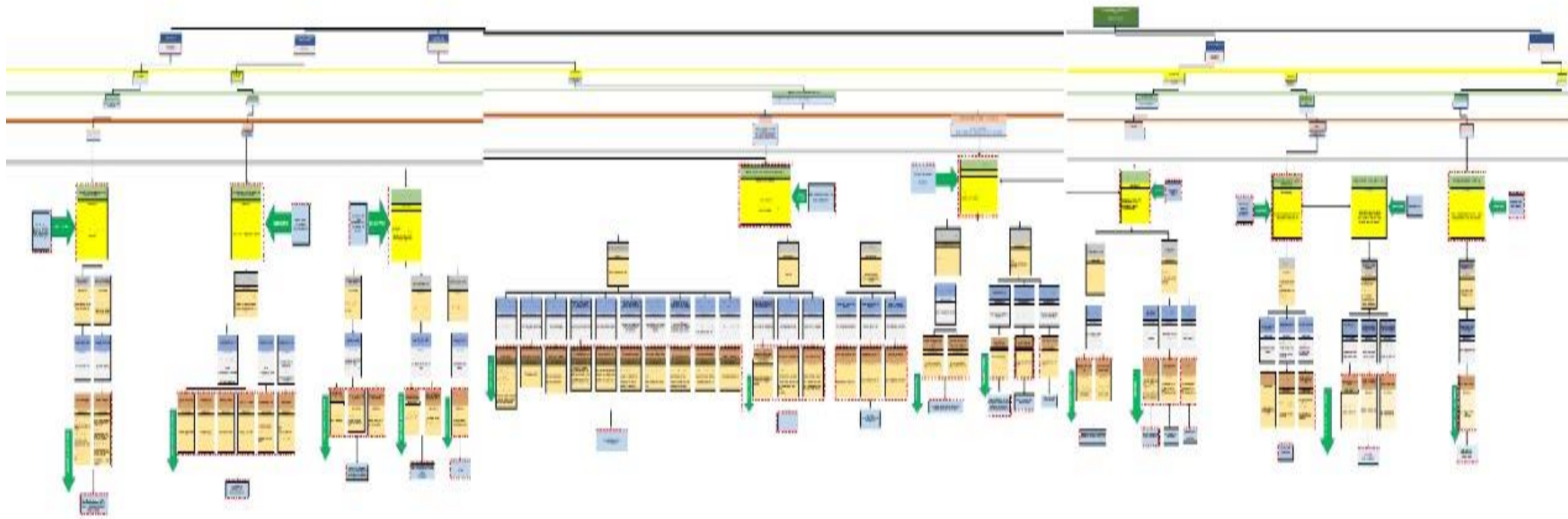
Palembang, 30 Januari 2026

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. SUMSEL
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM, IPM, ASEAN Eng
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 1975125 19903 1 004

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 66 TAHUN 2016
TANGGAL : 04 JULI 2024

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROV. SUMSEL
Ir. H. Yudho Joko Prastoyo, ST., MT., IPM, ASEAN Eng
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19760828 200501 1 009

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA
Dr. H. Muhammad Senen Har, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19671016 198909 1 001

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
ERISA SUSANTI, ST., M.Si
Pembina, IV/a NIP. 19790606 200903 2 008

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
P.F. JRIANSAH, SE, M.Si
Pembina, IV/a NIP. 19730912 200312 1 003

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
MAULIDA JUSTISIA, SE, MM
Pembina, IV/a NIP. 19820106 2008001 2 003

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
H. SAIFUL ISLAM, S.T., M.T
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19751127 199803 1 004

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
H. AHMAD WAHIDIN, SST, ST., MT
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19800703 200212 1 001

KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
MUHAMMAD AGUS ALHARIS, SE, ST., M.Si
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19720808 200212 1 002

KEPALA BIDANG PERUMAHAN
H. ZULKARNAEN, SP, MM
Pembina, IV/a NIP. 19741118 200701 1 004

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN AMPL
HABIBULLAH, ST
Penata: Tk.I, III/d NIP. 19680604 200791 1 001

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
IR. OCTARIANTO, ST., M.Si
Penata Tk.I, III/d NIP. 19811005 200801 1003

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
EDI GABRIEL BALDI EDB, ST
Penata Tk.I, III/d NIP. 19681204 199003 1 003

KEPALA SEKSI PENYIAPAN DATA PERUMAHAN
GANDHI INDRA FERMANA, ST,
Penata Tk.I, III/d NIP. 19880122 201101 1 001

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA
PENGELOLAAN AIR MINUM
MUSTIKA FEBRIANTI MARDIANA, S.T
Penata: Tk.I, III/d NIP. 19750225 199803 2 003

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
H. DEDED PULPA, ST
Penata Tk.I, III/d NIP. 19810612 201101 1 003

KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN
AHMAD ZULKARNAIN, ST., M.T., M.JRP,
Pembina, IV/a NIP. 19640505 200902 1 005

KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERUMAHAN
FERRY ARIANDI, ST., M.Si
Penata Tk.I, III/d NIP. 19760105 201001 1 006

KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
AMYUDARSYAH, S.T., MT
Pembina, IV/a NIP. 19820930 200803 1 002

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERDESAAN
RAFIKA DEVI, ST., MT
Pembina, IV/a NIP. 19770420 201101 2 004

KEPALA SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN
KAWASAN
ANGGA SENA GAUTAMA, S.T., M.T
Penata Tk.I, III/d NIP. 19850213 201101 1 002

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERUMAHAN
YUDISTIRA MUHSIN, ST., MT
Pembina, IV/a NIP. 19790308 200604 1 008

KEPALA UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
(PIP3B) DAN JASA KONSTRUKSI
MUALIMAH GUSTINI, ST, M.Si
Pembina, IV/a NIP. 19740806 199803 2 005

KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN & JAKON
GLADESTA ALHANDA, SE
Penata, III/c NIP. 19770420 201101 1 004

KEPALA SEKSI PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN, DAN JAKON
M. SYAZARI YAZUAR, S.T., M.Si, M.T
Pembina IV/a NIP. 19820106 200212 1 001

KEPALA SEKSI JASA KONSTRUKSI
UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN & JAKON
BUDI INDAH HAPSAR, ST, MT
Pembina, IV/a NIP. 19820419 201101 2 005



